

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI UPTD PUSKESMAS BOJONGGENTENG KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI

Fahri Nugraha¹, Rita Rahmawati², Denny Hernawan³

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, fahrinugrahaadm7@gmail.com

²Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, rita.rahmawati@unida.ac.id

³Ilmu Administrasi Publik, Universitas Djuanda Bogor, denny.hernawan@unida.ac.id

ABSTRACT

The Indonesian Ministry of Health has established a policy, namely the Childbirth assurance Program (Jampersal). Jampersal program is a program that is focused on providing guarantees to pregnant woman and their babies to get access to health services for pregnancy, childbirth and postnatal examinations with the ultimate goal being to suppress MMR and IMR. This research aims to find out how the Childbirth assurance program is implemented at the Bojonggenteng Health Center in Bojonggenteng District, Sukabumi District. And research will focus on the implementatiton of Childbirth assurance program in the Bojonggenteng Health center in Bojonggenteng sub-district. The method used is the method of mix method with descriptive type, namely the description in the form of a description to explain the answers given by respondents in the questionnaire, the data obtained through interviews, literature studies, document studies and observations. The results of this study indicate that the implementation of Childbirth assurance program (Jampersal) at the Bojonggenteng Puskesmas in the Bojonggenteng sub-district of Sukabumi according to respondents is included in the criteria both. This was explained that in implementing the jampersal program, it was running optimally, while the shortcomings in its implementation were the lack of community participation to participate in the program.

Key words: childbirth assurance; Implementation; Program.

ABSTRAK

Kementrian Kesehatan RI telah menetapkan suatu kebijakan yaitu Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Program Jampersal merupakan program yang difokuskan untuk memberikan jaminan kepada ibu hamil dan bayinya untuk mendapatkan akses layanan kesehatan pemeriksaan kehamilan, melahirkan dan pasca melahirkan dengan tujuan akhir dapat menekan AKI dan AKB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Jampersal di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. Dan peneliti akan memfokuskan pada implementasi program jampersal yang ada di puskesmas bojonggenteng kabupaten sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mix metode dengan tipe deskriptif yaitu uraian yang berupa penggambaran untuk menjelaskan jawaban-jawaban yang diberikan responden dalam kuesioner, data-data yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, studi dokumen dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Jampersal Di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi menurut responden termasuk dalam kriteria Baik. Hal ini dijelaskan bahwa dalam pengimplementasian program jampersal berjalan dengan optimal, adapun kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu partisipasi masyarakat yang kurang untuk mengikuti program tersebut.

Kata kunci: Jampersal; Implementasi; Program.

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui kementerian kesehatan RI menerapkan suatu kebijakan yang tertera didalam Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Program ini dibuat untuk pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional guna mensukseskan dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* tahun 2015. Salah satu dari tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yang terkait dengan program jampersal ini adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan diantaranya dengan membuat regulasi yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dan pada pasal 6 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Program penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Sukabumi mengacu kepada peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan. Berdasarkan Perda Sukabumi No 3

Tahun 2013 tersebut. Bahwa, kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Kemitraan Bidan, Paraji dan Kader Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip ketrbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan. Dalam rangka meningkatkan kemitraan bidan, paraji dan kader kesehatan perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi laporan tahunan KIA di Kabupaten Sukabumi tahun 2018. Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor diantaranya penyebab langsung dan tidak langsung salah satunya faktor penyebab langsung adalah faktor 3T ; terlambat pengambil keputusan keluarga mencari pertolongan, terlambat perjalanan menuju tempat rujukan dan terlambat mendapatkan penanganan ditempat rujukan.

Salah satu kecamatan yang meyumbang angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sukabumi adalah Kecamatan Bojonggenteng. Angka Kematian Ibu sebesar 0 orang dan Bayi sebesar 14 orang. Angka Kematian sebanyak 14 orang sejak tahun 2016. UPTD Puskesmas Bojonggenteng melakukan upaya penurunan AKI dan AKB, hasilnya cukup memuaskan. Selama 3 tahun Puskesmas Bojonggenteng mengalami penurunan dan kenaikan AKI dan AKB dari tahun 2016 sampai 2018.

Target pencapaian keberhasilan program jampersal adalah 94% yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Puskesmas Bojonggenteng menjadi Puskesmas terbaik dalam menjalankan program Jampersal selama 3 tahun berturut-turut dengan pencapaian yang cukup

memuaskan. Berikut data komulatif Persalinan.

Thn	Ibu dan Bayi	AKI	AKB		
			Neo Nat	Bayi	Balita
16	736	-	13	-	1
17	705	2	4	-	-
19	730	2	6	2	-

Sumber : Bidang Jampersal UPTD Puskesmas Bojonggenteng

Keterangan :

1. Neo Natal = Bayi Berusia 24 Hari
2. Bayi = Kurang Dari 1 Tahun
3. Balita = 1 sampai 5 Tahun.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis menganggap hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut dengan harapan untuk mengetahui dan memahami implementasi program Jampersal, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul "Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi"

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui Implementasi Program yang dirasakan oleh sasaran, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) membagi indikator implementasi yaitu :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan
2. Sumber-Sumber Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia dan Sumber daya Finansia
3. Karakteristik Badan-Badan Pelaksanaan. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan nonformal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat sangat banyak yang mempengaruhi

keberhasilan dan tidaknya kinerja implementasi kebijakan public.

5. Komunikasi Antar Organisasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik.
6. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Politik. Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian tipe deskriptif. Dalam hal ini peneliti mencoba mengemukakan ataupun menjelaskan apa yang ditemukan dilapangan secara deskriptif.

Berdasarkan hal tersebut maka metode penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai masalah Implementasi Program Jaminan persalian Di UPTD Puskesmas Bojonggenteng, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan mix metode yaitu gabungan data berupa angka-angka, analisis menggunakan statistic dan wawancara. (Sugiyono 2011:7)

Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi adalah sebagian masyarakat kecamatan bojonggenteng. Untuk menemukan sampel peneliti menggunakan dua sampel yang pertama untuk sampel aparat yaitu sampling jenuh atau sensus, sedangkan sampel yang kedua adalah masyarakat diambil dengan cara sampel Sampling Incidental, dimana sampel diambil secara acak dan bertujuan. Maka digunakan rumus slovin dan diperoleh sampel sebanyak 87,95 dibulatkan menjadi 88 orang yang mewakili populasi 730 orang dengan taraf kesalahan 10%, untuk mengetahui besaran sampel yaitu:

$$N = \text{Populasi}$$

$$n = \text{Sample}$$

e = presisi (perkiraan kesalahan 0,1)

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)
2. Kuesioner (Angket)
3. Observasi (Penelitian Lapangan)
4. Studi dokumen

Peneliti menggunakan skala instrument yang digunakan adalah skala likert. untuk menentukan skor dari setiap jawaban maka digunakan rumus liker sebagai berikut:

$$I = \frac{SKT - SKR}{V}$$

I = Interval

SKT = Skor Tertinggi

SKR = Skor Terendah

V = Jumlah

Adapun untuk keperluan analisis data kuantitatif, maka jawaban diberikan skor sebagai berikut :

Jawaban	Skor Nilai
Sangat baik	5
Baik	4
Cukup baik	3
Kurang baik	2
Sangat tidak baik	1

Hasil perhitungan dari 0,8 dijadikan patokan untuk kriteria penilaian sebagai berikut:

Skor	Kriteria
1-1,80	Sangat tidak baik
1,81-2,60	Kurang baik
2,61-3,40	Cukup baik
3,41-4,20	Baik
4,21-5.00	Sangat baik

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dari lapangan lalu diolah berdasarkan jawaban responden melalui angket yang

menggunakan rumus *Weight Mean Score* (WMS) :

$$M = \frac{\sum f(x)}{n}$$

Keterangan :

M = Angka penafsiran

f = Frekuensi jawaban

x = Skala nilai

n = Jumlah sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan angket mengenai Implementasi Program Jampersal sebagai berikut:

Rekapitulasi Dimensi Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

No	Item pernyataan	M	Kriteria penilaian
1	1	4,2	Sangat Baik
2	2	4,0	Baik
3	3	4,1	Baik
Jumlah		4,1	Baik

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala puskesmas dan responden program yang dijalankan oleh para pelaksana terbilang baik sesuai dengan pandangan masyarakat yang ikut menghadiri ketika ada sosialisasi tentang Jampersal yang dinilai sangat penting untuk kesehatan. Tingkatan pengukuran kinerja dilaksanakan dinilai baik dan membantu bagi masyarakat dengan tujuan kesehatan masyarakat.

Rekapitulasi Dimensi Sumber Daya

No	Item pernyataan	M	Kriteria penilaian
1	1	4,1	Baik
2	2	3,8	Baik
3	3	3,8	Baik
Jumlah		3,9	Baik

Berdasarkan pengamatan penulis melalui tanggapan responden mengenai

indikator jumlah sumber daya manusia sudah cukup terpenuhi untuk menjalankan program tersebut. Bahkan dilihat dari ketersediaan anggaran pun cukup baik untuk melaksanakan kebijakan dari program jampersal. Dan para pelaksana yang berkomitmen untuk menyampaikan implementasi program jampersal sangat baik.

Rekapitulasi Dimensi Komunakasi antar Organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

No	Item pernyataan	M	Kriteria penilaian
1	1	3,8	Baik
2	2	3,9	Baik
3	3	3,9	Baik
Jumlah		3,86	Baik

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, penyampaian program jampersal kepada masyarakat mudah dipahami dan dimengerti, sehingga pengetahuan masyarakat tentang adanya program jampersal yang dilaksanakan menjadi sangat antusias untuk mengikuti, bahwa kesehatan adalah hal yang utama, ditambah dengan kekonsistensian para pelaksana yang mampu mendorong masyarakat untuk hidup sehat menjadi faktor utama.

Rekapitulasi Dimensi Sikap Para Pelaksana

No	Item pernyataan	M	Kriteria penilaian
1	1	3,8	Baik
2	2	4,0	Baik
3	3	3,8	Baik
Jumlah		3,86	Baik

Berdasarkan pengamatan peneliti, watak dan karakter para pelaksana dilapangan menjadi modal utama dalam menyampaikan program guna menjaga kerharmonisan, kelemahan lembutan para pelaksana kepada masyarakat, tanggung jawab kerjasama dengan beberapa

anggota lain agar saling memeberika masukan demi tujuan program.

Rekapitulasi Dimensi *Emphaty*

No	Item pernyataan	M	Kriteria penilaian
1	1	4,1	Baik
2	2	4,0	Baik
3	3	4,0	Baik
4	4	3,7	Baik
5	5	3,3	Cukup Baik
Jumlah		3,82	Baik

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, kekondusifan masyarakat yang membantu melaksanakan program, hubungan para pelaksana dan sasaran terjalin baik, antusias masyarakat dalam mmbutuhkan kesehatan dilapangan terbilang baik, kondisi ekonmi yang bisa dikatakan baik dan cukup baik atau bahkan bisa dikatakan tidak baik sesuai dengan hasil wawancara dilapangan dan bahkan orang-orang seperti yang tidak mampu dalam ekonomi berhak mendapatkan program tersebut. Selanjutnya tingkat masyarakat yang cukup baik, mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui kapan program itu dilaksanakan. Maka dari itu para pelaksana harus bisa memhami lingkungan sosial untuk menemukan sasaran yang cocok dari program ini.

IMPLIKASI Implikasi Teoritis

Penyediaan program yang baik sangat penting terutama dimana sebuah intansi pemerintah harus bisa memberikan program yang terbaik karena masyarakat yang akan merasakan serta menilai bagaimana implementasi program yang disediakan apakah sudah berjalan dengan semestinya atau belum berjalan maksimal. Melalui teori implementasi kebijakan Model Van Meter dn Van Horn bahwa dalam dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan ada tiga unsur yang penting yaitu penilaian

implementasi program jampersal, tingkat pengukuran kinerja dilaksanakan dan tanggung jawab para pelaksana dalam menyampaikan kebijakan.

Implikasi Praktis

Implikasi praktis penelitian Implementasi program Jampersal Di UPTD Puskesmas Bojonggenteng Kecamatan Bojonggenteng, apabila program yang dilaksanakan dan dijalankan dengan baik, maka akan ada pengaruhnya terhadap pengimplementasian program Jampersal untuk kesehatan ibu dan bayi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

Penilaian variabel Implementasi Program di UPTD Puskesmas Bojonggenteng didasarkan pada lima dimensi yaitu : Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan-tujuan kebijakan, Sumber Daya, Komunikasin antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Sikap para pelaksana dan lingkungan sosial ekonomi dan politik. Hasil rekapitulasi dari analisis data tersebut merupakan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat yang sudah melaksanakan Program Jampersal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Implementasi Program Jampersal di UPTD Puskesmas Bojong Genteng dilakukan dengan baik, dengan nilai rata-rata sebesar 3,9.
- b) Dimensi dengan penilaian tertinggi apda pada dimensi Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan dengan nilai rata-rata sebesar 4,1. Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian program berjalan dengan baik dan optimal.
- c) Sedangkan dimensi dengan penilaian terendah ada pada dimensi lingkungan sosial ekonomi dan politik dengan nilai rata-rata 3,75. Hal ini

menunjukkan sudah baik dan cukup optimal, akan tetapi masih ada kekurangan yang terdapat ada tingkat partisipasi masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta pandangan peneliti dilokasi penelitian maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu :

1. Diharapkan kepada para pelaksana program di UPTD Puskesmas Bojonggenteng agar lebih dahulu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program yang akan dilaksanan agar antusias masyarakat akan kebutuhan kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang akan menjadi sasaran program.
2. Sikap para pelaksana dan hubungan baik dengan masyarakat adalah hal yang sangat penting guna meningkatkan kualitas Program Jampersal. Sehingga, masyarakat mendapatkan kenyamanan untuk memenuhi kebutuhan atas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Tachja. H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung Luslit KP2W Lemlit Unpad
- Widodo. 2001. *Implementasi Kebijakan*. Bandung: CV Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Buku Pedoman

Laporan Profil Kesehatan UPTD Puskesmas Bojonggenteng Mampu Poned Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi 2017,2018.

Skripsi

Miranti Salam (2013), "Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember"

Nur Azizah (2012), "Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah"

Isna Noer Fitriani (2008), "Implementasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Ngrayun Kabupaten Ponorogo"

Jurnal-Jurnal

R Rahmawati, G Pratidina , dan Muarif " Model Pelyanan Rumah Sakit Berbasis Krarakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Untunk Meningkatkan

Kepuasan Pasien" Jurnal Sosial Humaniora UNIDA vol 1 no 1 2010.

Sadam Husen, Rita Rahmawati, Denny Hernawan "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Taman Nasional Betung Kerihun Dan Danau Sentarum (Tnbkds) Kalimantan Barat". Jurnal GOVERNANSI ISSN 2442-3971 Volume 3 No 2, Oktober 2017

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kemitraan Bidan, Paraji Dan Kader Kesehatan.

Internet

<http://www.kemkes.go.id/>